



# Dana Desa Tetap Rp 51 M

## ■ Pemkab Tepis Ada Kenaikan

**MEMPAWAH, TRIBUN** - Pemkab Mempawah melalui Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah menyatakan tidak ada kenaikan Dana Desa (DD) setiap desa dari APBN. Hal tersebut langsung disampaikan Kabid Pemdes Dissos PP, PA dan PMD Kabupaten Mempawah Rizal Multiadi saat ditemui diruangannya.

"Tahun depan tidak ada kenaikan Dana desa dari APBN, jumlahnya masih sama yakni sekitar Rp 51 miliar untuk 60 desa di Kabupaten Mempawah," kata Rizal kepada *Tribun*, Rabu (20/12)

Lanjutnya, penggunaan DD saat ini yang telah jadi banyak mendapat atensi dari intitusi mulai dari BPK, BPKP, Kejaksaan hingga ke Polisi para pengguna anggaran dalam hal perangkat desa untuk menyiapkan diri dengan pengetahuan dan kemampuan. Kemampuan untuk paham aturan dan menjalankan seluruh peraturan yang berlaku.

"Untuk tahun ini proses pencairan dana desa sudah selesai. Mengenai pelaporan kita telah menggandeng BPKP melalui program sistem keuangan desa," ujarnya.

Sistem Keuangan Desa

**Kita telah mulai memberlakukan siskeudes seratus persen pada 2016 lalu dan sekarang kita lakukan lagi**

**Rizal Multiadi**  
Kabid Pemdes Dissos PP, PA dan PMD Mempawah

(Siskeudes) merupakan konsep pelaporan yang berbasis aplikasi. Rizal mengatakan Kabupaten Mempawah merupakan kabupaten pertama di Kalbar yang mulai memberlakukannya.

"Kita telah mulai memberlakukan siskeudes seratus persen pada 2016 lalu dan sekarang kita lakukan lagi," ujarnya.

Penguatan siskeudes kata Rizal saat ini tengah digenjut untuk tetap dilakukan oleh seluruh perangkat desa di Kabupaten Mempawah, karena pelaporan keuangan desa menjadi lampiran tidak terpisahkan dari LKPJ Bupati. "Kalau itu tak ada jangan-jangan WTP tahun ini

kita tidak dapat," ujarnya.

Rizal mengatakan langka yang dilakukan agar seluruh desa tetap melakukan siskeudes secara rutin setiap tiga bulan sekali BPKP memberikan pembinaan. "Ini satu di antara inovasi untuk LKPJ bupati. Jika ingin meraih WTP salah satu yang harus kita lakukan adalah merapihkan keuangan desa," ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Idris mengatakan meskipun mendapatkan informasi bahwa tidak ada penambahan jumlah DD oleh Kemendes, pihaknya menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan jumlah anggaran yang ada untuk pembangunan masyarakat di desanya.

"Berkaitan dengan penggunaan DD Tahun 2018 pada prinsipnya selaku kepala desa tentunya kita akan menggunakan DD yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan Masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Sejegi akan melaksanakan sesuai perencanaan yang kita susun dan tetapkan bersama dengan BPD berdasarkan usulan dari masyarakat yang tertuang di dalam dokumen RPJM-Des.

"Sebagai acuan dalam penyusunan RKP-Des untuk dimasukan dalam RAPB-Des Tahun 2018 dan ditetapkan Menjadi APB-Des Tahun 2018," ujarnya.

Idris mengatakan prioritas penggunaan DD mengacu Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yaitu untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan/ Infrastruktur, sarana dan Prasarana bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

"Ada juga bidang lainnya seperti peningkatan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi-potensi yang ada di desa agar dapat dijadikan produk unggulan serta penguatan ekonomi desa melalui wadah BUM-Des," ujarnya. **(dan)**